

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015 untuk pertama kali Indonesia melaksanakan pilkada serentak. Peristiwa politik ini akan menjadi salah satu sejarah besar bagi Indonesia. Pilkada serentak dilangsungkan pada 9 Desember 2015. Pilkada serentak berdasarkan UU 8/2015, pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak. Pilkada serentak periode pertama akan dilaksanakan untuk pemilihan 269 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari : 9 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 224 pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta 36 pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pilkada serentak akan dilaksanakan secara bertahap, tahap pertama pada tanggal 9 Desember 2015, tahap kedua pada bulan Februari 2017, tahap ketiga pada bulan Juni 2018, tahap keempat pada tahun 2020, tahap kelima pada tahun 2022, tahap keenam pada tahun 2023. Pilkada serentak secara nasional akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Pilkada serentak periode pertama akan dilaksanakan 9 Desember 2015, tentunya isu-isu pilkada serentak menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia dan ramai dibicarakan. Salah satu isu yang menimbulkan pro dan kontra adalah terkait adanya calon tunggal yang awalnya ada di tujuh daerah, ketujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah itu adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Mataram dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur, Kota Samarinda di Kalimantan Timur, serta Kota Surabaya, Kabupaten Pacitan dan Blitar di Jawa Timur. Pemerintah, DPR, KPU pun tidak menyangka hal ini akan terjadi dan diluar perkiraan.

Terkait peristiwa ini memunculkan pendapat dan reaksi dari berbagai kalangan seperti politisi, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, pengamat dan masyarakat. Ada juga yang berpendapat agar Presiden mengeluarkan Perppu

terkait calon tunggal supaya pilkada serentak di daerah tersebut tetap dilaksanakan. Disisi lain juga apabila Perppu diterbitkan banyak yang berpendapat melanggar asas-asas demokrasi dan menguntungkan salah satu pihak. Polemik ini pun terus bergulir dan mengundang perhatian seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasangan calon, maka pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut akan ditunda hingga Pilkada tahap kedua pada 2017. Peristiwa ini tentu sangat merugikan daerah tersebut karena akan berdampak kekosongan pemimpin di daerah tersebut hingga tahun 2017. Kekosongan pemimpin tentu sangat merugikan daerah tersebut karena akan memperlambat berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik dan sosial budaya. Selain itu hak untuk dipilih dan memilih yang dimiliki rakyat pun terampas dan tidak sesuai dengan UUD 1945 yang menjamin terpenuhinya hak konstitusi warga negara.

Berdasarkan permasalahan tersebut akhirnya KPU menjalankan rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan perpanjangan pendaftaran calon di tujuh daerah tersebut. Ternyata hingga akhir pendaftaran tersisa tiga daerah yang tetap hanya memiliki satu pasangan calon yaitu Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang mensyaratkan daerah harus diisi oleh minimal dua pasang calon kepala daerah, dengan demikian terhadap sisa daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dilakukan penundaan proses Pilkada sampai (pilkada serentak gelombang dua) pada 2017. Permasalahan tersebut pun digugat ke MK agar adanya kepastian hukum tetap terhadap calon tunggal di pilkada serentak. Akhirnya pada tanggal 29 September 2015 MK mengeluarkan keputusan memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk tetap melaksanakan pilkada serentak.

Keputusan MK pun harus diterima dan dijalankan sehingga KPU melakukan perubahan aturan dalam pilkada serentak. Polemik ini pun tidak berakhir sampai disini terbukti masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat hingga saat ini, ada yang dapat menerima dan ada juga yang mengatakan tidak setuju dengan keputusan MK. Oleh karena itu penulis melihat berita ini menarik untuk

diteliti. Peristiwa ini mengandung nilai berita pertentangan, dampak yang luas dan sangat penting. Peristiwa ini juga sangat mencuri perhatian media nasional hingga media lokal karena peristiwa pilkada serentak sangat menentukan bagaimana daerah tersebut dalam lima tahun ke depan.

Pemberitaan mengenai polemik calon tunggal di Indonesia dibingkai berbeda-beda oleh berbagai media massa. Masing-masing media memiliki pandangan tersendiri bagaimana memberitakan suatu peristiwa. Terkait dengan kemampuan media massa mampu mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku khalayak Selain sebagai penyebar informasi kepada masyarakat, media massa juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, seperti yang diungkapkan oleh Zaenuddin dalam bukunya. Keberadaan media dianggap sebagai 'kekuatan keempat' (The Fourth State) dalam sistem politik kenegaraan. Media sering dimanfaatkan sebagai pembela kebenaran dan keadilan, sekaligus juga sebagai pembentuk opini publik (Zaenuddin, 2011 : 10). Pendapat dan opini masyarakat tidak semata-mata timbul dengan sendirinya. Bagaimanapun media berperan secara aktif dalam mengkonstruksi peristiwa dan menerbitkan berita kepada masyarakat. Dari berbagai banyak berita yang diterbitkan dan dikonsumsi oleh masyarakat, media secara tidak langsung akan menimbulkan opini publik.

Media seperti yang kita lihat bukanlah saluran yang bebas yang memberitakan apa adanya. Media justru mengkonstruksi sedemikian rupa realitas. Ada yang diberitakan ada yang tidak diberitakan, ada yang dianggap penting ada yang tidak dianggap penting. Analisis framing secara sederhana dapat dijadikan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media (Eriyanto, 2011 : 77). Framing adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media.

Analisis framing yang dipilih itu sendiri adalah analisis Robert N. Entman yang mengedepankan pemilihan isu dan penonjolan aspek. Framing dipakai dalam berbagai aspek kehidupan apapun, namun yang menghubungkan adalah bagaimana teks komunikasi disajikan, bagaimana merepresentasikan apa yang ditampilkan secara menonjol mempengaruhi khalayak. Metode menurut tokoh framing Robert N. Entman sendiri menonjolkan pemilihan isu atau fakta dan

penonjolan aspek. Sedangkan untuk metode analisis framing lainnya, Pan dan Kosicki mengadaptasi pendekatan linguistik dengan memasukkan elemen, seperti pemakaian kata, pemilihan struktur. Pan dan Kosicki percaya bahwa konsepsi framing adalah psikologi dan sosiologis sang wartawan (Eriyanto, 2011 : 291).

Tokoh framing Murray Edelman mensejajarkan framing sebagai kategorisasi. Kategori, membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna. Tetapi, kategorisasi bisa berarti juga suatu penyederhanaan. Tokoh framing yang terakhir, William A. Gamson mengenai framing, pertama kali juga berkaitan dengan gerakan sosial. Gerakan sosial selalu menyeleksi dan menggunakan simbol, nilai dan retorika tertentu dalam memobilisasi khalayak.

Dalam menganalisis berita mengenai isu-isu pilkada serentak ini, penulis ingin menganalisa bagaimana media menonjolkan dan menghilangkan fakta yang terjadi pada polemik calon tunggal. Media terkadang dalam kepentingan maupun ideologinya menonjolkan atau menghilangkan isu atau fakta tertentu. Jadi untuk teks media mengenai isu-isu pilkada serentak, penulis menggunakan metode Robert N. Entman.

Alasan mengapa penulis menggunakan analisis framing Robert N. Entman adalah menitik beratkan pada pemilihan isu dan penonjolan aspek. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu (Eriyanto, 2011 : 221). Seleksi isu berkaitan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga berita yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan memilih aspek tertentu dari suatu isu. Entman merumuskannya ke dalam bentuk model framing sebagai berikut:

a. Definisi Masalah (*Defining Problems*)

Bagaimana suatu peristiwa dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?

b. Memperkirakan sumber masalah (*Diagnose Causes*)

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?

c. Membuat keputusan moral (*Make Moral judgement*)

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?

d. Menenkankan penyelesaian (*Treatment Recommendation/Suggest Remedies*).

Penyelesaian apa yang ditawarkan media untuk mengatasi masalah itu?

Analisis framing merupakan sebuah metode penelitian mengenai media massa yang dasar penelitiannya berasal dari teori Konstruksi Sosial. Dalam teori ini dipaparkan bahwa, realitas yang dilihat atau baca di media massa tersebut bukan merupakan realitas seperti yang benar benar terjadi, melainkan sebuah proses konstruksi dari media-media yang bersangkutan. Konsep mengenai teori ini diperkenalkan oleh Sosiolog Interpretatif Peter L. Berger. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tetapi sebaliknya dibentuk dan dikonstruksi.

Alasan peneliti memilih media *online* Tribunnews.com berdasarkan peringkat teratas dalam banyaknya pembaca yang mengakses situs berita tersebut. Tribunnews masuk dalam lima besar situs berita yang paling banyak dibaca. Berdasarkan www.alexacom lima situs berita teratas adalah detik.com, liputan6.com, kompas.com, kezone.com, tribunnews.com. Alasan yang lain juga adalah Tribunnews.com memiliki kolom khusus tentang berita pilkada serentak yang dimuat di Tribunnews.com.

Berdasarkan permasalahan tersebutlah peneliti mengangkat judul “Pemberitaan Polemik Calon Tunggal pada Pilkada Serentak 2015 di Tribunnews.com (Studi Menggunakan Teknik Analisis Framing Robert N. Entman)”.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, permasalahan yang ingin diangkat oleh penulis adalah bagaimanakah pembingkaihan berita Tribunnews.com mengenai polemik calon tunggal di pilkada serentak 2015 dalam model Robert N. Entman yang melihat dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas/isu.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana seleksi isu yang ditampilkan dalam pemberitaan polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 di Tribunnews.com?
2. Bagaimana penonjolan aspek yang ditampilkan dalam pemberitaan polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 di Tribunnews.com?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seleksi isu yang ditampilkan dalam pemberitaan polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 di Tribunnews.com
2. Untuk mengetahui penonjolan aspek yang ditampilkan dalam pemberitaan polemik calon tunggal pada pilkada serentak 2015 di Tribunnews.com

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi bidang ilmu komunikasi dalam meneliti sebuah pemberitaan dengan metode analisis framing.
2. Penelitian ini juga dapat menjadi studi banding bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian yang sama di masa yang akan mendatang.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menganalisis suatu berita secara lebih detail.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi informasi serta masukan bagi pihak media *online* Tribunnews.com.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian atau studi lanjutan di masa yang akan datang.

1.6. Tahapan Penelitian

1. Mencari dan mengumpulkan data berupa berita pilkada serentak dari Tribunnews.com.
2. Menganalisis naskah berita berdasarkan perangkat framing Robert N. Entman.
3. Membuat kesimpulan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan secara *online* dengan mengakses situs Tribunnews.com.

1.7.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian akan dilangsungkan selama 7 bulan yaitu dari bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Rincian kegiatan penelitian terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Waktu dan Tahapan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Menentukan topik penelitian dan judul							
2	Mengumpulkan							

	keseluruhan informasi		■					
3	Menyusun Proposal Skripsi			■	■			
4	Seminar Proposal Skripsi					■		
5	Analisis Data						■	
6	Menyusun Skripsi						■	
7	Sidang Skripsi							■

Sumber : Olahan penulis